Kemendag Gandeng Perbankan Fasilitasi Layanan Pembiayaan Ekspor

Tanggal	: Senin , 07 Desember 2020
Media	: neraca.co.id
Halaman	: 1
Wartawan	: gro
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Agus Suparmanto *(Menteri Perdagangan)*, Teten Masduki *(Menteri Koperasi dan UKM)*, Joko Suyanto *(Ketua Umum Perbarindo)*
Rubrik	: Perdagangan
Topik	: Fasilitasi Pembiayaan Ekspor

Kemendag Gandeng Perbankan Fasilitasi Layanan Pembiayaan Ekspor

Oleh: **gro** Senin, 07/12/2020

NERACA

Surabaya – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyaksikan penyerahan dana pembiayaan ekspor kepada 14 pelaku usaha kecil menengah (UKM) berorientasi ekspor dengan nilai mencapai Rp167 miliar.

Dana yang disediakan khusus dalam mendukung para eksportir untuk menghadapi masa sulit sekarang ini berasal dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kegiatan dilakukan di Surabaya, Jawa Timur.

Kementerian Perdagangan (Kemendag), berbagai terobosan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan ekspor dan mendukung UKM untuk gencar mengekspor, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

"Pembiayaan ekspor ini diharapkan dapat membantu 'UKM Naik Kelas' untuk tetap menggerakkan roda usahanya. Sehingga, mampu berkontribusi dalam peningkatan ekspor nonmigas dan ikut memperbaiki neraca perdagangan dan ekonomi nasional," kata Agus.

Komoditas ekspor dari para pelaku UKM yang menerima pembiayaan ekspor hari ini antara lain bidang hasil laut seperti ikan dan udang, produk kayu dan mebel, hingga alas kaki. Pemberian pembiayaan ekspor ini menjadi salah satu wujud sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, termasuk perbankan dan LPEI dalam memberikan kemudahan dukungan pembiayaan untuk ekspor.

Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau Bank BRI, dalam memberikan jasa layanan perbankan kepada pelaku usaha yang sudah rutin mengekspor maupun calon eksportir.

Kemendag mengandeng perbankan untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani di Surabaya, Jawa Timur.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Direktur Jenderal PEN Kemendag, Kasan dan Direktur Bisnis Kecil Ritel dan Menengah Bank BRI, Priyastomo. Kemendag berharap para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dapat memanfaatkan layanan perbankan yang telah dipersiapkan ini untuk memacu ekspor.

"Kami mengajak para mitra strategis, salah satunya Bank BRI, sebagai salah satu bank komersial untuk memberi manfaat lebih bagi para pelaku UKM di sektor perdagangan melalui penyediaan jasa layanan perbankannya. Kami berharap nota kesepahaman ini dapat semakin meningkatkan peran UKM dalam meningkatkan ekspor nasional," kata Kasan.

Menurut Kasan, kerja sama Kemendag dengan Bank BRI memiliki dua ruang lingkup, yaitu penyediaan dan pemanfaatan fasilitas jasa layanan perbankan bagi pelaku UKM di sektor perdagangan, serta pertukaran data dan informasi ini mengenai UKM di sektor perdagangan. Kerja sama ini berlaku untuk dua tahun ke depan hingga 2 Desember 2022.

"Kerja sama Kemendag dan Bank BRI ini juga menjadi upaya Kemendag membuat terobosan dalam merespons dampak masif pandemi Covid-19. Kemendag berupaya memfasilitasi pelaku usaha dengan stimulus fiskal maupun nonfiskal bagi pelaku usaha yang dapat mendorong ekspor nasional berdaya saing," jelas Kasan.

Tidak hanya Kemdag, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) pun komit untuk mendorong pelaku UMKM dengan menggandeng Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) guna mengimplementasikan dan mempercepat penyaluran anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) bagi UMKM.

Perbarindo adalah organisasi yang menghimpun BPR- BPRS yang merupakan salah satu ujung tombak penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Jumlah nasabah Perbarindo ada 4 juta UMKM dengan uang yang berputar sebesar 122 triliun.

"BPR-BPRS termasuk yang menjadi bagian program restrukturisasi, karena banyak nasabahnya yang terkendala untuk membayar cicilan bunga kredit, yang akan kita fasilitasi melalui subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah," kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Teten menegaskan, pemerintah ingin penyaluran anggaran PEN di mana alokasi buat UMKM sebesar Rp123,46 Triliun, dari total anggaran PEN Rp695, 2 triliun, bisa dilakukan secepatnya. Pada saat ini KemenkopUKM sedang mendorong penerbitan keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan OJK.

Sementara itu Ketua umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan siap melakukan langkah-langkah guna percepatan kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini.

"Kami terbiasa bergerak cepat, karena karakteristik BPR dan BPRS yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional lain menjadi daya tarik tersendiri, sehingga BPR-BPRS masih tumbuh dan berkembang," jelas Joko.

BERITA TERKAIT
- KKP Kucurkan Rp4,52 Milyar Pengolahan Pemasaran Ikan
- KUR Dorong Pengembangan Pemulihan Ekonomi Nasiona
- Pemerintah Ekspor Perdana Inggris
- Akhir 2020, HPE Tambang Se Menanjak
- Kontainer Langka, Ekspor Te Usaha Merugi